

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE
FOR MONEY* PERIODE 2015-2019**

Waseso Segoro¹

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

¹⁾waseso@staff.gunadarma.ac.id

Rohani Angelika Simanjuntak²

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

²⁾rohaniangelikas@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah memerlukan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah. Namun, untuk dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah tidak hanya menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi pemerintah harus menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015 – 2019 yang dapat ditinjau melalui rasio Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015 – 2019 yang diakses pada website www.djpk.kemenkeu.go.id.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015 – 2019, apabila ditinjau dari rasio ekonomis maka untuk periode 2016, 2018 dan 2019 dapat dikatakan ekonomis. Sedangkan untuk tahun 2015 dikatakan tidak ekonomis dan 2017 dapat dikatakan ekonomis berimbang. Apabila ditinjau dari rasio Efisiensi untuk tahun 2015, 2017 dan 2019 dapat dikatakan efisien. Tetapi, pada tahun 2016 tidak efisien dan 2018 dapat dikatakan efisien berimbang. Jika ditinjau dari rasio efektivitas pada tahun 2015 dan 2017 dapat dikatakan efektif. Tetapi pada tahun 2016 dan 2019 dapat dikatakan tidak efektif dan tahun 2018 dapat dikatakan efektif berimbang.

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan, *Value For Money*, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

1.PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Indrayani dan Khairunnisa, 2018).

Pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik. Oleh karena itu pemerintah memerlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas dan profesionalisme pada instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Penilaian pada pertanggungjawaban suatu instansi pemerintahan dapat dilihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya (APBD).

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme pada instansi pemerintah dapat dinilai dengan menggunakan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input, output, dan outcome* secara bersama-sama.

Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Khikmah, 2014). *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input, output, dan outcome* secara bersama-sama. Dalam mengukur *Value for Money* dapat menggunakan beberapa elemen yang dapat mengukur kinerja keuangan yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 ditinjau dari rasio ekonomis.
2. Menganalisis kinerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 ditinjau dari rasio efisiensi.
3. Menganalisis kinerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 ditinjau dari rasio efektivitas.

2.KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Menurut Moehriono (2012:95) Kinerja atau *performance* adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2006:267) Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, suatu organisasi dapat menganalisa ketercapaian kegiatan terlaksana sesuai rencana.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator *outcome* seringkali rancu dengan indikator *output*. Indikator *outcome* lebih utama dari sekedar *output*. Meskipun kegiatan telah dicapai dengan baik namun belum tentu *outcome* kegiatan telah dicapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan *indicator outcome*, suatu organisasi dapat mengetahui hasil yang diperoleh dalam bentuk *output* dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi penggunaannya.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 25) Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:12) Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak

pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Belanja Daerah

Menurut Darise (2008:50) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2006: 146) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Value For Money

Menurut Mahmudi (2010:20) *Value for money* adalah suatu konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Konsep *value for money* dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari program, kegiatan dan organisasi dengan menggunakan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi terkait dengan penggunaan input primer berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi. Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Indikator *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009: 130) indikator *Value for Money* terbagi menjadi dua, yaitu:

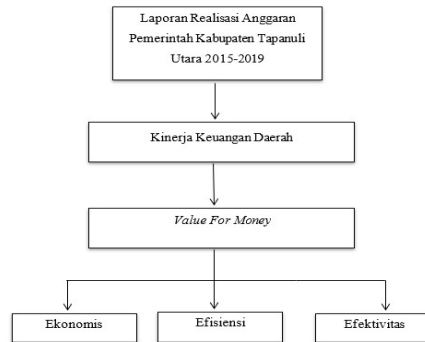
1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

Kerangka Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2015 – 2019 kepada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah sebanyak 5 data.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka yang dapat dihitung dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistika atau matematika.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2015 – 2019.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis Kuantitatif adalah suatu perhitungan laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan konsep *Value For Money*.

Variabel	Persentase	Ketentuan
Ekonomis	Jika < 100% Jika > 100% Jika = 100%	Ekonomis Tidak Ekonomis Ekonomis Berimbang
Efisiensi	Jika < 100% Jika > 100% Jika = 100%	Efisien Tidak Efisien Efisien Berimbang
Efektivitas	Jika > 100% Jika < 100% Jika = 100%	Efektif Tidak Efektif Efektif Berimbang

4. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahun	Ekonomis		Efisiensi		Efektivitas	
2015	109,2 8%	TIDAK EKONO MIS	98,20 %	EFISIEN	116,22 %	EFEKTIF
2016	95,90 %	EKONO MIS	104,4 5%	TIDAK EFISIEN	96,65 %	TIDAK EFEKTIF
2017	100,3 7%	EKONO MIS BERIMB ANG	98,55 %	EFISIEN	105,17 %	EFEKTIF
2018	93,54 %	EKONO MIS	100,2 6%	EFISIEN BERIMB ANG	100,59 %	EFEKTIF BERIMB ANG
2019	95,04 %	EKONO MIS	98,03 %	EFISIEN	99,91 %	TIDAK EFEKTIF
RATA - RATA	98,82 %	EKONO MIS	99,89 %	EFISIEN	103,70 %	EFEKTIF

Dapat dilihat hasil rangkuman penelitian mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menggunakan konsep *Value For Money*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa untuk tahun 2015 – 2019 Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum dapat memenuhi ketiga rasio dari konsep *Value For Money*.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja apabila ditinjau dari rasio Ekonomis kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 dapat disimpulkan adalah Ekonomis dengan perbandingan 3:2 dimana tahun 2016, 2018, dan 2019 adalah termasuk kategori ekonomis sedangkan tahun 2015 dan 2017 termasuk kategori tidak ekonomis dan ekonomis berimbang. Jika dirata-ratakan kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 adalah ekonomis dengan tingkat presentasi sebesar 98,82 %. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah mampu melakukan penghematan terhadap biaya dalam pemanfaatan sumber daya.

Untuk rasio Efisiensi kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 dapat disimpulkan adalah Efisien dengan perbandingan 3:2 dimana tahun 2015, 2017, dan 2019 adalah termasuk kategori efisien sedangkan tahun 2016 dan 2018 termasuk kategori tidak efisien dan efisien berimbang. Jika dirata-ratakan kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 adalah efisien dengan tingkat presentasi sebesar 99,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mampu meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya.

Untuk rasio Efektivitas kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 dapat disimpulkan adalah Efektif dengan perbandingan 2:3 dimana tahun 2015 dan 2017 adalah termasuk kategori efektif sedangkan tahun 2016, 2018 dan 2019 termasuk kategori tidak efektif dan efektif berimbang. Jika dirata-ratakan kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 adalah efektif dengan tingkat presentasi sebesar 103,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mampu mencapai tujuan dengan target yang telah ditetapkan.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang telah diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara apabila ditinjau dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun yaitu tahun 2015 - 2019 dinyatakan Ekonomis karena hasil perhitungan kurang dari 100%, yang artinya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah mampu melakukan penghematan terhadap biaya dalam pemanfaatan sumber daya.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara apabila ditinjau dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun yaitu tahun 2015 - 2019 dinyatakan Efisien karena hasil perhitungan kurang dari 100%, yang artinya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mampu meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja keuangan Kabupaten Utara apabila ditinjau dari rasio efektivitas maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Kabupaten Tapanuli Utara selama 5 tahun yaitu tahun 2015 - 2019 dinyatakan Efektif karena hasil perhitungan lebih dari 100%, yang artinya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mampu mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
 - a. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat menerapkan konsep value for money sebagai salah satu metode yang dapat
 - b. digunakan untuk menilai suatu perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap realisasinya.
 - c. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki tempat wisata baik jalan, sarana prasarana, tata kelola dan juga memperluas promosi tentang wisata yang ada di Tapanuli Utara agar wisata tersebut dapat diketahui dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke wisata sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan pendapatan demi menunjang kehidupan.
 - d. Selain dalam bidang pariwisata Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan hasil pertanian yaitu Beras, Kopi, dan Kemeyan. Hasil pertanian tersebut dapat dipasarkan melalui impor maupun ekspor untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Periode penelitian ini terbatas dari tahun 2015 – 2019. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat.
 - b. Diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dengan lebih baik lagi pada data kinerja keuangan agar pengukurannya lebih tepat. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas lagi dibandingkan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Indriyani, Khairunnisa, 2018. 'Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada DPKAD Kota Lhokseumawe'. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No 1 : 2018.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Moehriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.